

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dan negara dengan jumlah masjid atau musala terbanyak di dunia, sekitar satu juta buah masjid dan musala telah berdiri di Indonesia. Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan dewasa ini khususnya di Jawa Barat dengan penduduk 46 Juta, tercatat sekitar 162.228 masjid dan musala yang tersebar dari kota hingga ke pelosok desa. Namun disayangkan masyarakatnya dengan pendidikan dan derajat kesehatan terbilang masih rendah, serta angka kemiskinan Provinsi tersebut tergolong masih tinggi, sehingga potensi masjid belum dapat mensejahterakan umat dan masyarakat. (Dokumen DMI Provinsi Jawa Barat: 2013)

Besarnya potensi masjid di Jawa Barat sebagai asset umat dengan kondisi yang dialami umat Islam sendiri sebagai mayoritas warga masyarakat Jawa Barat ini adalah merupakan tantangan dan tanggung jawab Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat sebagai organisasi kemasjidan yang telah menerima amanah yang berkhidmat bagi pembinaan profesi pengelolaan masjid (pemberdayaan masjid) di Jawa Barat, melalui visinya “Terwujudnya Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jawa Barat yang mampu memberdayakan masjid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Pedoman pengurus DKM di Jawa Barat)

Jumlah masjid di Jawa Barat tersebut sangat potensial namun tidak seimbang dengan banyaknya langkah dan aktivitas memakmurkan / memberdayakan masjid tetapi karena adanya kesenjangan persepsi masyarakat terhadap fungsi masjid dan lemahnya SDM masyarakat yang akhirnya bermuara pada organisasi kemasjidan yang belum berfungsi secara optimal. (Dokumen DMI Provinsi Jawa Barat: 2013)

Dalam lintasan sejarah umat Islam kita mengetahui masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah sendiri ketika beliau hijrah adalah masjid quba yang beliau buat bersama para sahabat yang menjadi langkah awal simbolis bahwa pengembangan masyarakat Islam harus dimulai dari masjid. Karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Sidi Gazalba bahwa masjid bukan semata sebagai tempat sembahyang, melainkan juga sebagai pusat peradaban manusia. (Nanih dan Agus, 2001:21)

Ketika berbicara masjid maka hal yang tergambar di benak kaum muslimin pada umumnya yakni suatu bangunan besar tempat shalat berjama'ah dengan berbagai atribut kemasjidannya. (Eman, 2012:62). Tetapi perlu kita ketahui masjid bukan hanya tempat untuk beribadah saja melainkan masjid mempunyai memiliki banyak fungsi dan peran salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat.

Masjid merupakan pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spiritual, sosial dan kultural umat Islam. Dimana ada umat Islam, maka disitu tentunya ada masjid. Islam menempatkan masjid dalam posisi yang

strategis. Secara umum masjid memiliki banyak fungsi antara lain bidang sosial, pendidikan dan persatuan umat.

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam itu sendiri. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Mengingat fungsi yang strategis, maka perlu dibina sebaik-baiknya bagi segi fisik bangunan maupun segi kegiatan pemakmurannya.

Menurut Ahmad Sutarmadi, bukan sekedar memiliki peran dan fungsi sebagai sarana peribadatan saja bagi jamaahnya. Masjid memiliki misi yang lebih luas mencakup bidang pendidikan agama dan pengetahuan, bidang peningkatan hubungan sosial kemasyarakatan bagi para anggota jamaah dan peningkatan ekonomi jamaah sesuai dengan potensi lokal yang tersedia.

Eman Suherman (2012:62) mengemukakan bahwa dalam sepanjang sejarah perjalanannya, Masjid nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat ada beberapa peranan yang telah diemban oleh Masjid Nabawi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah (shalat dan zikir)
- b. Tempat konsultasi dan komunikasi (ekonomi, sosial dan budaya)
- c. Tempat pendidikan
- d. Tempat santunan sosial
- e. Pusat penerangan atau pembelaan agama
- f. Tempat perdamaian dan pengadilan sengketa

g. Tempat latihan militer

Agaknya masjid pada masa silam mampu berperan sedemikian luas, disebabkan antara lain keadaan masyarakat yang masih sangat berpegang teguh kepada nilai, norma dan jiwa agama, kemampuan pembina-pembina masjid menghubungkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dengan uraian dan kegiatan masjid. Keadaan itu kini telah berubah, sehingga timbulah lembaga-lembaga baru yang mengambil alih sebagai peranan masjid di masa lalu, yaitu organisasi-organisasi keagamaan swasta dan lembaga-lembaga pemerintah, sebagai pengarah kehidupan duniawi dan ukhwari umat beragama.

Menurut Dewan Masjid Indonesia (DMI) ada tiga fungsi masjid. Pertama, masjid dapat difungsikan sebagai pusat ibadah, baik ibadah mahdhah, maupun ibadah sosial. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung kepada Allah SWT, seperti sholat, mengaji dan lainnya. Tentu, secara tidak langsung ibadah-ibadah tersebut juga ada hubungannya dengan masyarakat. Sedangkan sebagai pusat ibadah sosial, masjid dapat difungsikan untuk mengelola zakat, wakaf, membangun ukhuwah islamiyah, menjaga keberhasilan dan kesehatan bersama, melaksanakan kurban dan membantu peningkatan ekonomi umat. Kedua, memanfaatkan masjid sebagai pusat pengembangan masyarakat, melalui berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki masjid seperti khutbah, pengajian, kursus keterampilan yang dibutuhkan anggota jamaah dan menyelenggarakan pendidikan formal sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga membina persatuan umat. (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Masjid_Indonesia, diakses pada tanggal 10 desember 2014)

Dewan Masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi tingkat nasional dengan tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Organisasi ini didirikan pada 22 Juni 1972 dengan maksud untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia dan kecerdasan umat serta tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT dalam wilayah Negara republik Indonesia. DMI mempunyai kepengurusan disetiap Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Pimpinan DMI dipilih secara demokratis setiap lima tahun melalui muktamar nasional. (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Masjid_Indonesia, diakses pada tanggal 10 desember 2014)

Dewan masjid Indonesia (DMI) adalah organisasi masyarakat kemasjidan yang tujuannya untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Keberadaan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jawa Barat sejak tanggal 26 April 1983 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat No.82/SK 668/Bintal/1983 yang mendapat pengesahan Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia tanggal 9 Mei 1983 No.084/DMI/PP/KPTS/V/1983 dengan Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat yang pertama tahun 1983-1993. (<http://dmijabar.or.id/tentang-dmi-jabar/>, diakses pada tanggal 12 desember 2014)

Bila menilik dari pendapat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan sejarah masjid di masa lampau, terlihat jelas masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun semua hal yang bersifat sosial bisa dilakukan oleh masjid, salah satu fungsinya adalah sebagai pusat pengembangan masyarakat atau

memberdayakan masyarakat. Konsep pemberdayaan menjadi penting karena dapat memberikan perspektif positif melalui pemberdayaan masjid untuk kesejahteraan umat Islam. Komunitas Umat Islam yang diberdayakan tidak dipandang sebagai komunitas yang menjadi objek pasif penerima pelayanan, melainkan sebuah komunitas yang memiliki beragam potensi dan kemampuan yang dapat diberdayakan.

Kegiatan Pemberdayaan Umat Islam (mustahik) dapat dilakukan melalui pendampingan dengan memberikan motivasi, meningkatkan kesadaran, membina aspek pengetahuan dan pelatihan. Peranan dari Dewan Masjid Indonesia pun sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan umat .

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada organisasi masyarakat ini, karena ormas ini bisa menjadi salah satu jembatan yang dapat meningkatkan kualitas umat dalam pemberdayaan masyarakat. Judul yang akan diambil adalah **“PERANAN DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS MASJID”**.

B. Rumusan Masalah

Masjid belum difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pada umumnya masjid difungsikan hanya untuk kegiatan ibadah ritual sedangkan kegiatan ibadah sosial kemasyarakatan belum banyak diperbuat. Adapun beberapa pokok permasalahan yang dikemukakan antara lain :

1. Program apa saja yang dicanangkan oleh DMI Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan masyarakat?

2. Bagaimana pelaksanaan program yang dilakukan oleh DMI Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana pencapaian program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid pada DMI Provinsi Jawa Barat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Program yang dicanangkan oleh DMI Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan masyarakat
 - b. Untuk Mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh DMI Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan masyarakat
 - c. Untuk Mengetahui pencapaian program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid pada DMI Provinsi Jawa Barat
2. Kegunaan Penelitian
 - a. *Secara Akademis*, Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengetahuan ilmiah dalam bidang pengembangan masyarakat Islam terutama konseptual pemberdayaan, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang teori-teori dan konsep-konsep tertentu dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
 - b. *Kegunaan Praktis*, penelitian ini diharapkan berguna bagi peningkatan program pemberdayaan masyarakat, dapat berguna untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

selanjutnya, dan juga diharapkan berguna untuk dijadikan bahan acuan untuk mewujudkan masyarakat yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

D. Kerangka Pemikiran

Sudah diketahui bersama, bahwa masjid memiliki kedudukan penting bagi umat Islam dalam upaya membentuk pribadi dan kepribadian masyarakat yang islami. Dalam rangka mewujudkan urgensi itulah, masjid harus dapat diberdayakan atau difungsikan sebaik-baiknya dalam arti harus dioptimalkan dalam pemungsiannya. Hal ini sejalan dengan penegasan Allah perihal untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan perlu dikembangkan pula institusi-institusi keagamaan supaya berkontribusi terhadap pembangunan :

Dalam firman Allah SWT surat At-taubah ayat 18 :

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Depag RI, 2007:189)

Institusi keagamaan yang paling potensial untuk dikembangkan salah satunya adalah masjid, sejarah telah mencatat empat belas abad yang lalu, Rasulullah SAW telah berhasil membawa umat Islam ke dalam sebuah tatanan

yang lebih tinggi, maju dan sempurna dengan menjadikan masjid sebagai pijakan awal dari setiap langkah yang dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang sejahtera.

Fungsi masjid sebagai pusat pembersihan diri umat Islam dari segala dosa, nista dan kemaksiatan yang dilakukan. Pengembangan kembali masjid sebagai pusat pelaksanaan ibadah shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya untuk meningkatkan kualitas umat. (Asep dan Cecep, 2010:12)

Menurut Miftah Farid : “Masjid dalam peradaban Islam, bukan sekedar sebuah tempat kegiatan keagamaan dan kebudayaan, tetapi merupakan suatu tata kelembagaan yang menjadi sarana pembinaan masyarakat dan keluarga muslim serta insan-insan peradaban islam”. (Asep dan Cecep, 2010:13)

Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*lisadvantaged*). *Empowerment aims to increase the power of disadvantaged*, demikian menurut Jim Ife seperti di kutip Suharto (1997:214). Sementara Swift dan Levin mengatakan pemberdayaan menunjuk pada usaha “*reallocation of power*” melalui perubahan struktur sosial (Suharto, 1997:214). Sedangkan Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 1997:215).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara dakwah *bi ahsanil amal* (Asep dan Agus, 2004: 4) dalam term Syukriadi Sambas bahwa dakwah

biahsanil amal adalah dakwah transformatif yang dilakukan dalam rangka perekayasaan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pranata sosial keagamaan, serta menumbuh-kembangkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Mengenai dakwah *biahsanil amal* ini, dalam Quran surat Fushilat ayat 33, Allah Swt berfirman:



“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?"

Masyarakat yang berdaya merupakan idaman setiap umat. Karena dengan menjadi masyarakat yang berdaya berarti semua kebutuhan baik materil maupun spiritual terpenuhi sehingga memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. (Edi Suharto, 2005:58) mengungkapkan pendapatnya mengenai pemberdayaan sebagai berikut :

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan); menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan; berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar, demikian Payne menulis dalam buku *Modern Social Work Theory* (1997:268).

Namun demikian, untuk memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka menjadi lebih berdaya.

Konsepsi pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam agaknya cukup relevan dalam hal ini. Beberapa asumsi yang dapat digunakan dalam rangka mewujudkan semangat ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pada intinya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat tidak berwujud tawaran sebuah proyek usaha kepada masyarakat, tetapi sebuah pembenahan struktur sosial yang mengedepankan keadilan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan suatu perubahan sosial yang berarti bagi peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. Kerangka pemahaman ini akan menjerumuskan kepada usaha-usaha yang sekadar

memberikan kesenangan sesaat dan bersifat tambal sulam. Misalnya, pemberian bantuan dana segar kepada masyarakat hanya akan mengakibatkan hilangnya kemandirian dalam masyarakat tersebut atau timbulnya ketergantungan. Akibat yang lebih buruk adalah tumbuhnya mental “meminta”. Padahal, dalam Islam, meminta itu tingkatannya beberapa derajat lebih rendah dari pada memberi.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya. Menurut Soedjatmoko, ada suatu proses yang seringkali dilupakan bahwa pembangunan adalah *social learning*. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sesungguhnya merupakan sebuah proses kolektif dimana kehidupan berkeluarga, bertetangga, dan bernegara tidak sekadar menyiapkan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan sosial yang mereka lalui, tetapi secara aktif mengarahkan perubahan tersebut pada terpenuhinya kebutuhan bersama.

Keempat, pemberdayaan masyarakat, tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai kehadiran mereka untuk mengikuti suatu kegiatan, melainkan dipahami sebagai kontribusi mereka dalam setiap tahapan yang mesti dilalui oleh suatu program kerja pemberdayaan masyarakat, terutama dalam tahapan perumusan kebutuhan yang mesti dipenuhi. Asumsinya, masyarakatlah yang paling tahu kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya pengembangan masyarakat. Tidak mungkin rasanya tuntutan akan keterlibatan masyarakat dalam

suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya ataupun bekal yang cukup. Oleh karena itu, mesti ada suatu mekanisme dan sistem untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat harus diberi suatu kepercayaan bahwa tanpa ada keterlibatan mereka secara penuh, perbaikan kualitas kehidupan mereka tidak akan membawa hasil yang berarti. Memang, sering kali *people empowerment* diawali dengan mengubah dahulu cara pandang masyarakat dari yang hanya menerima menjadi aktif partisipatif.

Konteks pemberdayaan yang telah dijelaskan diatas, menjadi landasan dalam efisiensi sebagai sebuah pemecahan masalah (*problem solving*) tatkala seseorang atau pelaku pemberdaya dihadapkan pada permasalahan sosial karena hal itupun menjadi dasar bagi seseorang untuk membuat kerangka atau pemetaan dalam menghadapi suatu masalah sosial.

Pemberdayaan merupakan pembangunan yang menekankan pada legitimasi kekuatan rakyat, yang bertumpu pada manusia dan kemanusiaan. Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (*participatory community empowerment*) merupakan pilihan strategi pembangunan yang banyak digunakan negara-negara yang ingin keluar dari krisis. Oleh karena itu, dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan politik, sosial, ekonomi dan budaya dikondisikan sedemikian rupa supaya esensi pemberdayaan tidak terdistorsi (Harry Hikmat, 2004: 14-16). Dalam pelaksanaan pemberdayaan diperlukan peran fasilitator yang profesional baik dari perorangan, pemerintah maupun lembaga pemberdayaan

masyarakat untuk membantu memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Mardikanto, 2012:139)

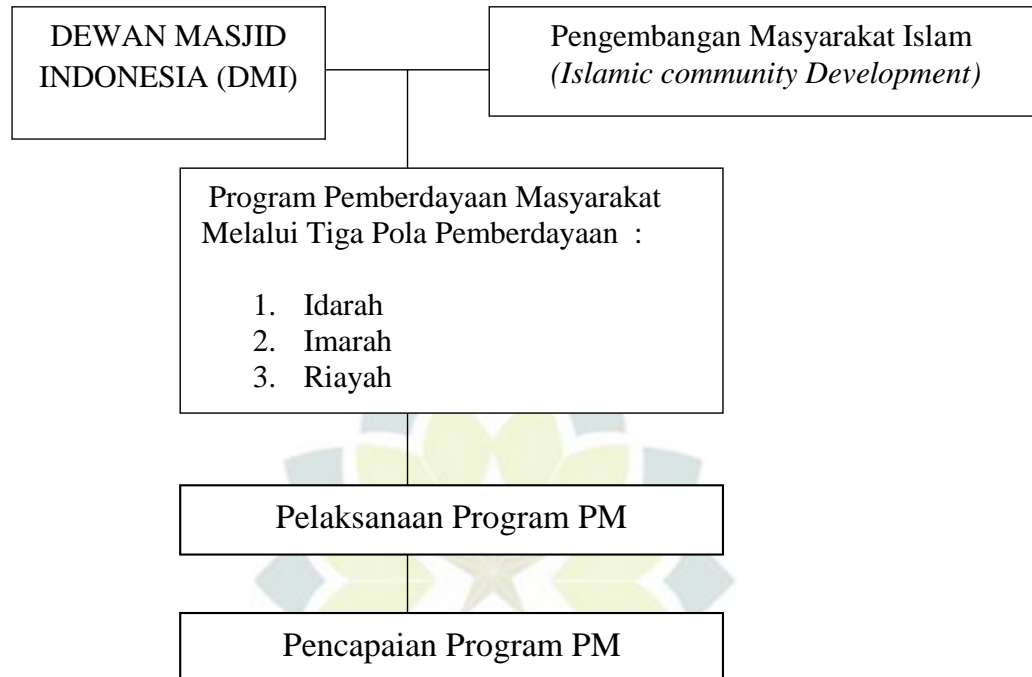
Dari kerangka pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu langkah strategis yang di tempuh untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada pada masyarakat adalah melauai pemberdayaan. Karena langkah ini di nilai sebagai langkah yang *humanis*, tidak menghilangkan kreativitas dan inovasi masyarakat serta berusaha untuk mendayagunakan potensi atau *softskill* yang ada pada masyarakat dengan maksimal sebagai dasar inisiatif kreatif dasar sumber daya manusia. Dan disini peran fasilitator sangat diperlukan Karena dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menjadi salah satu organisasi masyarakat yang berusaha mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan melalui masjid . Salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas umat. Kegiatan ini menjadi langkah alternatif pemberdayaan dan pengembangan umat sebagai suatu pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.

Adapun Program Pemberdayaan Masyarakat DMI Provinsi Jawa Barat adalah Pemberdayaan Organisasi dan Kepemudaan, Pemberdayaan Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan Ekonomi Umat, Pengembangan Dakwah dan Pengkajian, Pemberdayaan Kesehatan dan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Secara skematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 1 Tentang Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Pengolahan Penelitian, Juni 2015

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat di jalan Muara Raya No.41 Bandung 40243 (Telp.022-5225519). Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Di lokasi ini dipandang representatif untuk mengungkap data-data yang akan diteliti sebagai pusat dari teknik pelaksanaan program.
- b. Lokasi ini tidak terlalu jauh sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*Independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. (Sugiyono , 2007:53)

Metode penelitian deskriptif dimaksudkan bagi sebuah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lainnya. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa dan tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari pengamatan dan wawancara langsung kepada pengurus ormas Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Barat
- b. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan beberapa buku-buku pendukung penelitian, dokumen instansi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Data-data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan pada tahapan sebelumnya.

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini melalui:

- 1) Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- 2) Wawancara (*Interview*) merupakan suatu percakapan, Tanya jawab lisan fisik dan diarahkan pada masalah tertentu.
- 3) Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Moleong 2012:217)

Moleong (2012:217) mengemukakan dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan dalam dokumentasi adalah:

1. Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi bertujuan untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian atau situasi nyata yang pernah dialami oleh subjek secara langsung disertai dengan situasi sosial yang melingkupinya, dan bagaimana subjek mengartikan kejadian dan situasi tersebut.

2. Dokumen resmi

Dokumen resmi terbagi kedalam dua kategori dokumen yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa catatan seperti memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan pimpinan, dan lain sebagainya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, koran, buletin, surat pernyataan, dan lain sebagainya (Moleong, 2012:219).

Teknik ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian adalah merupakan teknik apabila dalam penelitian terdapat kekeliruan maka sumber data masih tetap dan belum berubah karena dalam studi dokumentasi ini yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Creswell (1994:40) mengemukakan beberapa poin penting yang perlu di perhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain:

- 1) Analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya.

- 2) Pastikan bahwa proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan berdasarkan pada proses reduksi data (*data reduction*) dan interpretasi (*interpretation*).
- 3) Ubah data hasil reduksi ke dalam bentuk matriks.
- 4) Identifikasi prosedur pengodean (*coding*) digunakan dalam mereduksi informasi ke dalam tema-tema atau kategori-kategori yang ada.
- 5) Hasil analisis data yang telah melewati prosedur reduksi yang telah diubah menjadi bentuk matriks yang telah diberi kode (*coding*), selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih.

